

ABSTRAK

Ahmad Firman Hidayatullah ; “Kewajiban nafkah narapidana terhadap istri dan anak menurut perundang-Undangan dan hukum Islam serta implementasinya di Lapas II B Purwakarta” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Pernikahan merupakan sebagai wujud perbuatan hukum antara suami dan istri, dimana seorang suami mempunyai hak dan kewajiban salah satunya pemenuhan nafkah, Nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran, pengobatan, dan juga pakaian. Dalam pemenuhan nafkah ini seorang suami harus bekerja ekstra keras dan banting tulang dalam pencariannya karena kebutuhan akan ekonomi itu hampir tiap hari harus di penuhi baik itu urusan dapur, alat-alat kecantikan istri, ataupun jajan anak. dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Keadaan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan IIB Purwakarta ini hanya mengikuti kegiatan program pembinaan baik itu pembinaan untuk dirinya sendiri ataupun pembinaan kemandirian, tidak ada upaya lebih yang harus dilakukan narapidana dalam pemenuhan nafkah itu sendiri karena pembinaan kemandirian yang dilakukan hanya sebatas pelatihan saja dan ini efeknya setelah para narapidana itu keluar saja. Namun berbeda dengan keadaan bila lapas itu sendiri ada fasilitas yang memadai agar para narapidana itu dapat bekerja ataupun pengelolaan dalam bidang pertanian, peternakan ataupun home industry. Upaya yang dilakukan terhadap hak para narapidana tersebut yang bisa di lakukan hanya bisa terlaksana bagi suami berstatus narapidana yang bekerjasama dengan pihak ketiga, bagi yang yang tidak bekerjasama dengan pihak ketiga maka tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini membuat suami berstatus narapidana sulit memberikan nafkah kepada istrinya. Karna tidak semua fasilitas di Lembaga Pemasyarakatan itu sama, karna seluruh Indonesia itu tidak sama dalam hal fasilitas contohnya Lembaga Pemasyarakatan buatan yang dari Belanda dibandingkan dengan Lembaga Pemasyarakatan yang hasil btan pruduk sendiri dimana Lembaga Pemasyarakatan pruduk Belanda lahannya sangat sempit sedangkan produk sendiri itu lebih besar lahannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Jenis data dikelompokkan menjadi dua kategori, primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, terhadap suami berstatus Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Purwakarta.

Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa para narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Purwakarta tidak dapat memberikan nafkah kepada keluarga, namun ada upaya yang bisa mereka perbuat yaitu pertama menitipkan istri dan anak kepada keluarga sehingga tanggungan nafkahnya menjadi Utang, kedua dengan cara meninggalkan usaha untuk anak dan istrinya sebelum mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan. Dan ini sesuai dengan pendapat Imam madzhab Hanafi bila suami tidak mampu maka nafkahnya menjadi utang, dan madzhab Imam maliki bahwa suami tidak mampu maka gugur kewajiban nafkahnya.

Kata kunci ; Nafkah, Narapidana, Suami

ABSTRACT

Ahmad Firman Hidayatullah ; "The obligation of prisoners to provide for their wives and children in Prison II B Purwakarta" UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Marriage is a form of legal action between husband and wife, where a husband has rights and obligations, one of which is the fulfillment of bread, this income varies, can be in the form of food, shelter, lessons, medicine, and also clothing. In fulfilling this livelihood, a husband must work extra hard and hard in his search because the need for the economy almost every day must be fulfilled, be it kitchen affairs, wife's beauty tools, or children's snacks. In meeting the needs of life sometimes makes a husband commit an act of error in making a living to provide for his family, so this action falls into an act of violation of the law and makes him a convict so that he must serve a sentence which is then called a prisoner.

The condition of the prisoners in IIB Purwakarta Penitentiary is only to participate in coaching program activities, be it coaching for themselves or self-reliance development, there is no more effort that must be done by prisoners in fulfilling the livelihood itself because the independence development carried out is only limited to training and this is the effect after the prisoners just leave. However, it is different from the situation if the prison itself has adequate facilities so that the prisoners can work or manage in agriculture, animal husbandry or home industry. Efforts made on the rights of these prisoners that can be done can only be carried out for husbands who are prisoners who cooperate with third parties, for those who do not cooperate with third parties do not get wages for the work done. This makes it difficult for a husband with the status of a prisoner to provide for his wife. Because not all facilities in prisons are the same, because throughout Indonesia it is not the same in terms of facilities, for example artificial penitentiaries from the Netherlands compared to prisons that are made by their own products, where the Dutch prisons have very narrow land while the product itself is larger in land.

This research was conducted using a qualitative approach with a descriptive method. Data types are grouped into two categories, primary and secondary. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, documentation, on husbands with the status of prisoners in Purwakarta class IIB Penitentiary.

From the results of the research conducted that the inmates in Purwakarta Class IIB Penitentiary cannot provide for their families, but there are efforts they can do, namely first entrusting their wives and children to the family so that their dependents become debts, second by leaving the business for their children and wives before they are in the Penitentiary. And this is in accordance with the opinion of the Imam of the Hanafi madhhab if the husband is not able then his income becomes a debt, and the Imam maliki madhhab that the husband is not capable then forfeited his obligation to provide for him.

Keywords; Bread, Prisoner, Husband